BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

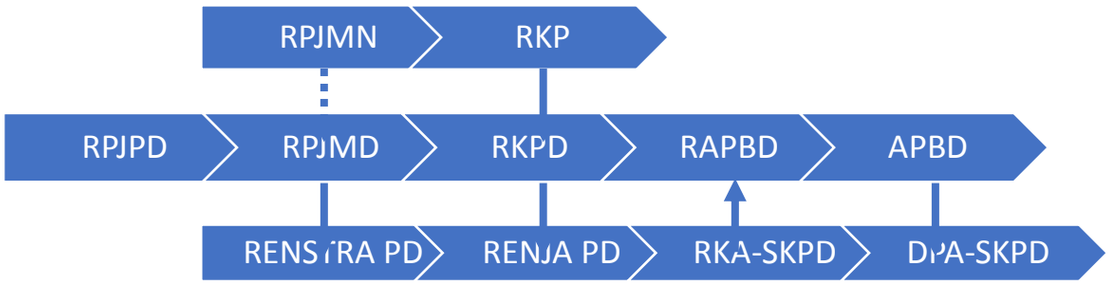
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun

2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

A. Dinas Kesehatan

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		296,559,039,000	116,524,723,478	275,091,034,324	194,906,823,994	70.85	343,823,061,278	467,781,677,276	136.05
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**	**295,000**	1.18	**25,000,000**	**50,295,000**	201.18
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	25,000,000	25,000,000	25,000,000	295,000	1.18	25,000,000	50,295,000	201.18

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85,298,539,000	24,143,833,516	45,720,514,000	40,517,027,556	88.62	134,666,182,000	199,327,043,072	137.88
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85,298,539,000	24,143,833,516	45,720,514,000	40,517,027,556	88.62	134,666,182,000	199,327,043,072	137.88
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		610,000,000	9,697,500	15,000,000	2,040,000	13.6	359,400,000	371,137,500	60.35
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	600,000,000						-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisai peraturan perundang-undangan	10,000,000	9,697,500	15,000,000	2,040,000	13.6	359,400,000	371,137,500	2,474.25
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		579,500,000	253,655,751	704,500,000	91,618,740	13	607,136,578	952,411,069	104.15
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15,000,000	3,800,000	15,000,000	142,800	0.95	15,000,000	18,942,800	126.29

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0						-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15,000,000	1,741,990	15,000,000	865,000	5.77	15,000,000	17,606,990	117.38
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	195,000,000	27,650,400	190,000,000	47,825,640	25.17	192,636,578	268,112,618	134.06
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100,000,000	86,917,965	130,000,000	17,141,300	13.19	130,000,000	234,059,265	180.05
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4,500,000	79,140,000	4,500,000	3,375,000	75	4,500,000	87,015,000	1,933.67
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	250,000,000	54,405,396	350,000,000	22,269,000	6.36	250,000,000	326,674,396	108.89
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		850,000,000	942,983,370	578,340,374		0	676,342,700	1,619,326,070	95.25

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan jabatan	600,000,000	800,809,000					800,809,000	133.47
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraaan operasional/lapangan	0						-	-
				Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel di Dinkes	0	52,905,400	119,076,700	-	0	188,776,700	241,682,100	161.12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	250,000,000	89,268,970	459,263,674	-	0	487,566,000	576,834,970	115.37
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		641,000,000	356,982,410	641,000,000	229,951,749	35.87	641,000,000	1,227,934,159	191.57
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	4,000,000	978,500	4,000,000	318,000	7.95	4,000,000	5,296,500	132.41
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	589,000,000	356,003,910	589,000,000	197,633,749	33.55	589,000,000	1,142,637,659	194

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	48,000,000		48,000,000	32,000,000	66.67	48,000,000	80,000,000	166.67
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,555,000,000	367,570,931	630,000,000	157,534,641	25.01	848,000,000	1,373,105,572	53.22
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinas jabatan	25,000,000		300,000,000	117,770,141	39.26		117,770,141	235.54
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	300,000,000	267,078,531				300,000,000	567,078,531	189.03
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	15,000,000	14,427,500	15,000,000	8,190,000	54.6	15,000,000	37,617,500	250.78
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	2,000,000,000	78,309,900	300,000,000	30,399,500	10.13	518,000,000	626,709,400	31.34
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	215,000,000	7,755,000	15,000,000	1,175,000	7.83	15,000,000	23,930,000	159.53

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	0						-	-
				Peningkatan Pelayanan BLUD		206,000,000,000	90,425,000,000	226,776,679,950	153,908,356,308.16	67.87	206,000,000,000	262,860,424,834.16	127.6
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	SPM yang memenuhi target	206,000,000,000	90,425,000,000	226,776,679,950	153,908,356,308.16	67.87	206,000,000,000	262,860,424,834.16	127.6
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		58,163,629,193	58,704,525,963	583,305,637,435	68,961,166,631	11.82		127,665,692,594	161.74
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		33,917,425,000	18,345,228,058	77,017,749,887	18,209,676,168	23.64	32,697,867,665	46,187,862,013	125.03
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0					800,000,000	800,000,000	114.29
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan Rumah sakit	2,500,000,000	8,000,000,000	4,000,000,000		0		2,500,000,000	100

				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0		1,365,799,900	199,624,000	14.62	630,699,900	830,323,900	83.03
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800,000,000	208,956,000	436,893,000	-	0	676,143,000	885,099,000	110.64
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0						-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,458,617,563	9,000,000,000	57,378,430,000	10,678,769,125	18.61	24,458,617,563	27,072,476,810	110.69
				Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase Obat Fornas dan Perbekalan Kesehatan	1,100,000,000	1,117,548,758	1,956,800,150	8,000,000	0.41	1,100,000,065	2,225,548,823	111.28
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembangunan pagar, urug dan paving puskesmas baron, pustu grojogan dan pustu ngujung	800,000,000	18,723,300	245,949,700	-	0	798,599,700	817,323,000	81.73

				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan di Puskesmas Induk, Puskesmas pembantu dan polindes	50,000,000		43,120,000	-	0	25,000,000	25,000,000	33.33
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah sakit	4,208,807,437		11,590,757,137	7,323,283,043	63.18	4,208,807,437	11,032,090,480	262.12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23,396,204,193	40,154,489,155	505,693,769,448	50,620,271,913	10.01	21,753,514,250	112,528,275,318	275.2
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	529,450,000	72,190,766	529,000,000	14,710,500	2.78	529,450,000	616,351,266	97.92
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,000,000	181,277,500	75,000,000	988,871,085	1318.49	75,000,000	1,245,148,585	1,660.20
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50,000,000		50,000,000	1,492,500	2.99	50,000,000	51,492,500	102.99

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	75,000,000	38,371,010	75,000,000	-	0	75,000,000	113,371,010	151.16
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,000,000		75,000,000	2,579,000	3.44	75,000,000	77,579,000	103.44
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,000,000		175,100,000	158,543,000	90.54	100,000,000	258,543,000	147.28
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	75,000,000	65,510,200	72,000,000	2,433,300	3.38	75,000,000	142,943,500	190.59

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	90,000,000	36,481,600	97,000,000	722,000	0.74	90,000,000	127,203,600	77.09
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	502,216,000	3,520,200	82,600,000	2,280,000	2.76	502,216,000	508,016,200	86.51
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB ditangani < 24 jam	20,000,000	10,000,000	-	274,957,300	#DIV/0!		284,957,300	1,424.79
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	655,030,000	344,707,655	807,880,000	120,433,150	14.91	655,030,000	1,120,170,805	112.02
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	25,000,000	7,110,700	25,000,000	12,865,600	51.46	25,000,000	44,976,300	179.91
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	75,000,000	41,672,500	100,000,000	13,637,400	13.64	75,000,000	130,309,900	130.31

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75,000,000	25,430,480	18,400,000	1,202,700	6.54	75,000,000	101,633,180	135.51
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Surveilans Kesehatan	50,000,000	22,620,000	25,000,000	-	0	50,000,000	72,620,000	145.24
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50,000,000	50,202,950	50,000,000	2,077,000	4.15	50,000,000	102,279,950	102.28
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	350,000,000	43,965,300	471,363,860,604	24,460,376,409	5.19	350,000,000	24,854,341,709	2,616.25
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	19,319,508,193	38,643,637,204	31,363,860,604	24,460,376,409	77.99	**18,338,000,000**	81,442,013,613	232.64
				Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan	20,000,000				#DIV/0!		-	-

				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	25,000,000				#DIV/0!	**25,000,000**	25,000,000	100
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa STBM	175,000,000		188,000,000	27,974,300	14.88	**150,000,000**	177,974,300	88.99
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300,000,000	567,791,090	480,668,240	74,740,260	15.55	388,818,250	1,031,349,600	206.27
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	85,000,000		40,400,000	-	0		-	-
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	500,000,000							
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		250,000,000	204,808,750	204,400,000	21,218,800	10.38		226,027,550	90.41
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengeloaan data dan informasi kesehatan	125,000,000	123,168,750	119,400,000	20,715,300	17.35	126,000,000	269,884,050	215.91

				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000,000	81,640,000	85,000,000	503,500	0.59	100,000,000	182,143,500	182.14
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		600,000,000		389,718,100	109,999,750	28.23	730,000,000	839,999,750	98.82
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya kedaruratan masalah kesehatan di pos kesehatan pada hari besar nasional, idul fitri, natal tahun baru dan hari besar lainnya dan tercapainya pelayanan	150,000,000		150,000,000	109,999,750	73.33	280,000,000	389,999,750	260
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		450,000,000		239,718,100	-	0	450,000,000	450,000,000	64.29
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		4,835,200,000	40,193,450	115,200,000	159,145,900	138.15		199,339,350	4.08

				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		20,000,000		20,000,000	733,600	3.67		733,600	3.67
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pengajuan izin praktik tenakes yang diterima	**10,000,000**				#DIV/0!		-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	10,000,000		20,000,000	733,600	3.67	20,000,000	20,733,600	207.34
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		4,765,200,000		50,000,000	4,245,300	8.49		4,245,300	0.09
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	60,000,000		50,000,000	4,245,300	8.49		4,245,300	14.15

				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart	Jumlah Tenakes di fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	4,705,200,000				#DIV/0!	4,705,200,000	4,705,200,000	100
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0				#DIV/0!	70,000,000	70,000,000	233.33
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000	40,193,450	45,200,000	154,167,000	341.08		194,360,450	194.36
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai STR dalam periode waktu tertentu	50,000,000	40,193,450	45,200,000	154,167,000	341.08	40,000,000	234,360,450	234.36
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		255,000,000	35,314,500	176,550,000	107,202,400	60.72		142,516,900	42.54
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50,000,000	13,947,800	99,150,000		0		13,947,800	27.9

				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sasaran Bindalwas serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	25,000,000	13,947,800	91,100,000	-	0	25,000,000	38,947,800	155.79
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sasaran perizinan apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25,000,000		8,050,000	-	0	25,000,000	25,000,000	100
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		10,000,000		10,000,000		0		-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT	10,000,000		10,000,000	-	0	10,000,000	10,000,000	100

				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		50,000,000	21,366,700	8,700,000	45,314,750	520.86		66,681,450	133.36
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sasaran bindalwas serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT yang dapat diproduksi oleh IRT	50,000,000	21,366,700	8,700,000	45,314,750	520.86	50,000,000	116,681,450	233.36
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		120,000,000		50,000,000	31,866,200	63.73		31,866,200	21.24
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	terukurnya tingkat keamanan pangan di tempat pengelolaan makanan di wilayah kabupaten Nganjuk	120,000,000		50,000,000	31,866,200	63.73	120,000,000	151,866,200	101.24
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri		25,000,000		8,700,000	30,021,450	345.07		30,021,450	120.09

				Rumah Tangga								
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sasaran produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	25,000,000		8,700,000	30,021,450	345.07	25,000,000	55,021,450	220.09
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		0						
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	jumlah pangan siap saji yang mendapat pembinaan	0						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,050,000,000	-	1,963,448,000	533,350,000	27.16		533,350,000	46.38
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000	-	-	-				

				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya kegiatan advokasi dan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kabupaten nganjuk	150,000,000							
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250,000,000	-	344,900,000	15,500,000	4.49	250,000,000	265,500,000	75.86
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	terlaksananya upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten nganjuk	250,000,000		344,900,000	15,500,000	4.49	250,000,000	265,500,000	75.86
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		650,000,000	-	636,824,000	251,175,000	39.44	634,924,000	886,099,000	136.32
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	terlaksananya bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM di kabupaten nganjuk	650,000,000		636,824,000	251,175,000	39.44	634,924,000	886,099,000	136.32
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								-	#DIV/0!

				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		58,789,423,607	42,583,580,090	45,927,861,913	4,093,727,704	8.91	48,891,412,875	95,568,720,669	162.56
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan rutin Puskesmas dari dana DAU	13,048,010,732	7,943,936,200	7,146,576,504	4,093,727,704	57.28	3,150,000,000	15,187,663,904	116.4
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi BPJS	45,741,412,875	34,639,643,890	38,781,285,409	-	0	45,741,412,875	80,381,056,765	175.73

Tabel 2.2 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Target Berdasarkan Pemetaan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

A. DINAS KESEHATAN

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		296,559,039,000	116,524,723,478	275,091,034,324	194,906,823,994	70.85	343,823,061,278	467,781,677,276	136.05
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**	**295,000**	1.18	**25,000,000**	**50,295,000**	201.18
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	25,000,000	25,000,000	25,000,000	295,000	1.18	25,000,000	50,295,000	201.18

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85,298,539,000	24,143,833,516	45,720,514,000	40,517,027,556	88.62	134,666,182,000	199,327,043,072	137.88
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85,298,539,000	24,143,833,516	45,720,514,000	40,517,027,556	88.62	134,666,182,000	199,327,043,072	137.88
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		610,000,000	9,697,500	15,000,000	2,040,000	13.6	359,400,000	371,137,500	60.35
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	600,000,000						-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisai peraturan perundang-undangan	10,000,000	9,697,500	15,000,000	2,040,000	13.6	359,400,000	371,137,500	2,474.25
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		579,500,000	253,655,751	704,500,000	91,618,740	13	607,136,578	952,411,069	104.15
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15,000,000	3,800,000	15,000,000	142,800	0.95	15,000,000	18,942,800	126.29

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0						-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15,000,000	1,741,990	15,000,000	865,000	5.77	15,000,000	17,606,990	117.38
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	195,000,000	27,650,400	190,000,000	47,825,640	25.17	192,636,578	268,112,618	134.06
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100,000,000	86,917,965	130,000,000	17,141,300	13.19	130,000,000	234,059,265	180.05
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4,500,000	79,140,000	4,500,000	3,375,000	75	4,500,000	87,015,000	1,933.67
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	250,000,000	54,405,396	350,000,000	22,269,000	6.36	250,000,000	326,674,396	108.89
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		850,000,000	942,983,370	578,340,374		0	676,342,700	1,619,326,070	95.25

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan jabatan	600,000,000	800,809,000					800,809,000	133.47
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraaan operasional/lapangan	0						-	-
				Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel di Dinkes	0	52,905,400	119,076,700	-	0	188,776,700	241,682,100	161.12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	250,000,000	89,268,970	459,263,674	-	0	487,566,000	576,834,970	115.37
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		641,000,000	356,982,410	641,000,000	229,951,749	35.87	641,000,000	1,227,934,159	191.57
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	4,000,000	978,500	4,000,000	318,000	7.95	4,000,000	5,296,500	132.41
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	589,000,000	356,003,910	589,000,000	197,633,749	33.55	589,000,000	1,142,637,659	194

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	48,000,000		48,000,000	32,000,000	66.67	48,000,000	80,000,000	166.67
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,555,000,000	367,570,931	630,000,000	157,534,641	25.01	848,000,000	1,373,105,572	53.22
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinas jabatan	25,000,000		300,000,000	117,770,141	39.26		117,770,141	235.54
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	300,000,000	267,078,531				300,000,000	567,078,531	189.03
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	15,000,000	14,427,500	15,000,000	8,190,000	54.6	15,000,000	37,617,500	250.78
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	2,000,000,000	78,309,900	300,000,000	30,399,500	10.13	518,000,000	626,709,400	31.34
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	215,000,000	7,755,000	15,000,000	1,175,000	7.83	15,000,000	23,930,000	159.53

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	0						-	-
				Peningkatan Pelayanan BLUD		206,000,000,000	90,425,000,000	226,776,679,950	153,908,356,308.16	67.87	206,000,000,000	262,860,424,834.16	127.6
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	SPM yang memenuhi target	206,000,000,000	90,425,000,000	226,776,679,950	153,908,356,308.16	67.87	206,000,000,000	262,860,424,834.16	127.6
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		58,163,629,193	58,704,525,963	583,305,637,435	68,961,166,631	11.82		127,665,692,594	161.74
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		33,917,425,000	18,345,228,058	77,017,749,887	18,209,676,168	23.64	32,697,867,665	46,187,862,013	125.03
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0					800,000,000	800,000,000	114.29
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan Rumah sakit	2,500,000,000	8,000,000,000	4,000,000,000		0		2,500,000,000	100

				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0		1,365,799,900	199,624,000	14.62	630,699,900	830,323,900	83.03
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800,000,000	208,956,000	436,893,000	-	0	676,143,000	885,099,000	110.64
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0						-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,458,617,563	9,000,000,000	57,378,430,000	10,678,769,125	18.61	24,458,617,563	27,072,476,810	110.69
				Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase Obat Fornas dan Perbekalan Kesehatan	1,100,000,000	1,117,548,758	1,956,800,150	8,000,000	0.41	1,100,000,065	2,225,548,823	111.28
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembangunan pagar, urug dan paving puskesmas baron, pustu grojogan dan pustu ngujung	800,000,000	18,723,300	245,949,700	-	0	798,599,700	817,323,000	81.73

				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan di Puskesmas Induk, Puskesmas pembantu dan polindes	50,000,000		43,120,000	-	0	25,000,000	25,000,000	33.33
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah sakit	4,208,807,437		11,590,757,137	7,323,283,043	63.18	4,208,807,437	11,032,090,480	262.12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23,396,204,193	40,154,489,155	505,693,769,448	50,620,271,913	10.01	21,753,514,250	112,528,275,318	275.2
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	529,450,000	72,190,766	529,000,000	14,710,500	2.78	529,450,000	616,351,266	97.92
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,000,000	181,277,500	75,000,000	988,871,085	1318.49	75,000,000	1,245,148,585	1,660.20
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50,000,000		50,000,000	1,492,500	2.99	50,000,000	51,492,500	102.99

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	75,000,000	38,371,010	75,000,000	-	0	75,000,000	113,371,010	151.16
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,000,000		75,000,000	2,579,000	3.44	75,000,000	77,579,000	103.44
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,000,000		175,100,000	158,543,000	90.54	100,000,000	258,543,000	147.28
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	75,000,000	65,510,200	72,000,000	2,433,300	3.38	75,000,000	142,943,500	190.59

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	90,000,000	36,481,600	97,000,000	722,000	0.74	90,000,000	127,203,600	77.09
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	502,216,000	3,520,200	82,600,000	2,280,000	2.76	502,216,000	508,016,200	86.51
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB ditangani < 24 jam	20,000,000	10,000,000	-	274,957,300	#DIV/0!		284,957,300	1,424.79
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	655,030,000	344,707,655	807,880,000	120,433,150	14.91	655,030,000	1,120,170,805	112.02
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	25,000,000	7,110,700	25,000,000	12,865,600	51.46	25,000,000	44,976,300	179.91
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	75,000,000	41,672,500	100,000,000	13,637,400	13.64	75,000,000	130,309,900	130.31

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75,000,000	25,430,480	18,400,000	1,202,700	6.54	75,000,000	101,633,180	135.51
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Surveilans Kesehatan	50,000,000	22,620,000	25,000,000	-	0	50,000,000	72,620,000	145.24
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50,000,000	50,202,950	50,000,000	2,077,000	4.15	50,000,000	102,279,950	102.28
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	350,000,000	43,965,300	471,363,860,604	24,460,376,409	5.19	350,000,000	24,854,341,709	2,616.25
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	19,319,508,193	38,643,637,204	31,363,860,604	24,460,376,409	77.99	**18,338,000,000**	81,442,013,613	232.64
				Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	20,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit	25,000,000				#DIV/0!	**25,000,000**	25,000,000	100

					Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional								
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa STBM	175,000,000		188,000,000	27,974,300	14.88	**150,000,000**	177,974,300	88.99
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300,000,000	567,791,090	480,668,240	74,740,260	15.55	388,818,250	1,031,349,600	206.27
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	85,000,000		40,400,000	-	0		-	-
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	500,000,000							
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		250,000,000	204,808,750	204,400,000	21,218,800	10.38		226,027,550	90.41
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengeloaan data dan informasi kesehatan	125,000,000	123,168,750	119,400,000	20,715,300	17.35	126,000,000	269,884,050	215.91

				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	25,000,000				#DIV/0!		-	-
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000,000	81,640,000	85,000,000	503,500	0.59	100,000,000	182,143,500	182.14
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		600,000,000		389,718,100	109,999,750	28.23	730,000,000	839,999,750	98.82
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya kedaruratan masalah kesehatan di pos kesehatan pada hari besar nasional, idul fitri, natal tahun baru dan hari besar lainnya dan tercapainya pelayanan	150,000,000		150,000,000	109,999,750	73.33	280,000,000	389,999,750	260
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		450,000,000		239,718,100	-	0	450,000,000	450,000,000	64.29
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		4,835,200,000	40,193,450	115,200,000	159,145,900	138.15		199,339,350	4.08

				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		20,000,000		20,000,000	733,600	3.67		733,600	3.67
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pengajuan izin praktik tenakes yang diterima	**10,000,000**				#DIV/0!		-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	10,000,000		20,000,000	733,600	3.67	20,000,000	20,733,600	207.34
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		4,765,200,000		50,000,000	4,245,300	8.49		4,245,300	0.09
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	60,000,000		50,000,000	4,245,300	8.49		4,245,300	14.15

				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart	Jumlah Tenakes di fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	4,705,200,000				#DIV/0!	4,705,200,000	4,705,200,000	100
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0				#DIV/0!	70,000,000	70,000,000	233.33
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000	40,193,450	45,200,000	154,167,000	341.08		194,360,450	194.36
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai STR dalam periode waktu tertentu	50,000,000	40,193,450	45,200,000	154,167,000	341.08	40,000,000	234,360,450	234.36
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		255,000,000	35,314,500	176,550,000	107,202,400	60.72		142,516,900	42.54
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50,000,000	13,947,800	99,150,000		0		13,947,800	27.9

				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sasaran Bindalwas serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	25,000,000	13,947,800	91,100,000	-	0	25,000,000	38,947,800	155.79
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sasaran perizinan apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25,000,000		8,050,000	-	0	25,000,000	25,000,000	100
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		10,000,000		10,000,000		0		-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT	10,000,000		10,000,000	-	0	10,000,000	10,000,000	100

				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		50,000,000	21,366,700	8,700,000	45,314,750	520.86		66,681,450	133.36
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sasaran bindalwas serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT yang dapat diproduksi oleh IRT	50,000,000	21,366,700	8,700,000	45,314,750	520.86	50,000,000	116,681,450	233.36
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		120,000,000		50,000,000	31,866,200	63.73		31,866,200	21.24
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	terukurnya tingkat keamanan pangan di tempat pengelolaan makanan di wilayah kabupaten Nganjuk	120,000,000		50,000,000	31,866,200	63.73	120,000,000	151,866,200	101.24
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri		25,000,000		8,700,000	30,021,450	345.07		30,021,450	120.09

				Rumah Tangga								
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sasaran produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	25,000,000		8,700,000	30,021,450	345.07	25,000,000	55,021,450	220.09
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		0						
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	jumlah pangan siap saji yang mendapat pembinaan	0						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,050,000,000	-	1,963,448,000	533,350,000	27.16		533,350,000	46.38
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000	-	-	-				

				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya kegiatan advokasi dan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kabupaten nganjuk	150,000,000							
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250,000,000	-	344,900,000	15,500,000	4.49	250,000,000	265,500,000	75.86
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	terlaksananya upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten nganjuk	250,000,000		344,900,000	15,500,000	4.49	250,000,000	265,500,000	75.86
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		650,000,000	-	636,824,000	251,175,000	39.44	634,924,000	886,099,000	136.32
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	terlaksananya bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM di kabupaten nganjuk	650,000,000		636,824,000	251,175,000	39.44	634,924,000	886,099,000	136.32
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						#DIV/0!		-	#DIV/0!

				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		58,789,423,607	42,583,580,090	45,927,861,913	4,093,727,704	8.91	48,891,412,875	95,568,720,669	162.56
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan rutin Puskesmas dari dana DAU	13,048,010,732	7,943,936,200	7,146,576,504	4,093,727,704	57.28	3,150,000,000	15,187,663,904	116.4
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi BPJS	45,741,412,875	34,639,643,890	38,781,285,409	-	0	45,741,412,875	80,381,056,765	175.73

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan
Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang memadainya bandwith internet mempengaruhi yang koneksi aplikasi virtual meeting (buffer) selama adaptasi kebiasaan baru pelaksanaan rapat/seminar secara	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menambah bandwith internet dengan meningkatkan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

daring pada saat pandemi COVID-19.		dan Listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya Pandemi Covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melakukan pergeseran Anggaran dengan memprioritaskan Belanja dalam penanganan Covid-19
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	79%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Menurunnya kasus covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	79%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya Pandemi Covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Pertemuan dilakukan dengan zoom meeting
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	79%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya Pandemi Covid-19	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	81%	Sedang

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

A. DINAS KESEHATAN

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Dinas Kesehatan											
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,63%	79,57%			Dinas Kesehatan
2.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,64%	82,11%			Dinas Kesehatan
3.	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,32%	90,56%			Dinas Kesehatan
4.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,40%	74,64%			Dinas Kesehatan
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,00%	49,26%			Dinas Kesehatan
6.	Persentase orang usia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,88%	23,52%	100%	100%	Dinas

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											Kesehatan
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,51%	49,65%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,99%	14,53%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,05%	97,08%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,92%	76,11%	100%	100%	Dinas Kesehatan
11.	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,19%	18,57%	100%	100%	Dinas Kesehatan
12.	Persentase orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,44%	105,5	100%	100%	Dinas

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								%			Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Dinas Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi
2. Masih adanya kasus balita gizi buruk dan balita stunting.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih kurang secara kuantitas dan kualitasnya (kompetensi).
4. Kurangnya kualitas dan mutu pelayanan Kesehatan, karena kurangnya sumberdaya dan fasilitas (sarana prasarana) yang memadai.
5. Pembiayaan kesehatan dari APBD Kabupaten masih kurang sehingga banyak kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak teranggarkan sehingga mempengaruhi capaian kinerja kesehatan.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

-

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapai dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Dinas Kesehatan :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) masih diatas target

   Hambatan :

   - Status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil
   - Fasilitas / sarana prasarana kurang memadai/ sesuai standar
   - Belum tersedianya dokter spesialis kandungan di Puskesmas
   - Koordinasi lintas program belum berjalan maksimal

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Hambatan :

   - Status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil
   - Faktor ekonomi keluarga

- Belum tersedianya dokter spesialis kandungan di Puskesmas

3. Masih terdapatnya Status Gizi Buruk atau Stunting

   Hambatan :

   - Pendapatatan keluarga dan jumlah balita dalam keluarga,
   - Pemberian ASI eksklusif,
   - ketepatan pemberian MP-ASI,
   - Riwayat penyakit infeksi balita,
   - Pengetahuan gizi dan perilaku kadarzi keluarga,
   - Tingkat konsumsi energi balita,
   - Kelengkapan imunisasi balita.

4. Penyakit tidak menular telah menjadi masalah yang utama karena angka kesakitan dan kematian yang tinggi.

   Hambatan :

   - Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan

5. Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata

   Hambatan :

   - Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
   - Formasi sebagian tenaga Kesehatan belum merata pada masing-masing unit Puskesmas
   - Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan
   - Ketersediaan SDM (dokter, dokter gigi) di FKTP kurang
   - Keterbatasan jumlah SDM di Rumah Sakit khususnya dokter spesialis
   - Belum adanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
   - Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi

6. Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum maksimal

   Hambatan :

   - Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan
   - Sarana yang tersedia tidak memenuhi standart pelayanan
   - Jumlah dan jenis Prasarana yang tersedia ada yang belum memenuhi standart
   - Terbatasnya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana

7. Cakupan pembiayan kesehatan bagi penduduk miskin baru mencapai 60,5 % dari target 100 % pada tahun 2019

   Hambatan :

   - Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-3 yaitu menigkatnya kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sasaran strategis daerah Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ada beberapa indikator hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3. Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan RisikoTerinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan memberikan kontibusi terhadap tujuan ke-3 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian pendudukdan indikator kinerja tujuan/ sasaran indeks kesehatan.

Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2021

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1)									
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	44.67	PM		PM		PM		Tidak ada dalam Dokrenda
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tujuan 2)									
	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	0.9	<1	8,8	<1	10,3	<1	10,5	
	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan									

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	16	16	9,3	15	9,4	15		
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	83.3	PM	78,2	PM	76,5	PM		
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (Tujuan 3)									
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.	‰ (jumlah per 100.000 penduduk)	<84	<84	63,42	<83	83	<83		Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	Jumlah ibu hamil dan bayi risiko tinggi yang didampingi	orang	4,85	PM		PM		PM		
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.									
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	‰	7.44	PM	0,9	PM	0	PM	0,6	Tidak ada dalam Dokrenda
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	‰	4.85	PM		PM	6,8	PM	8,8	Tidak ada dalam Dokrenda

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	‰	<9	<9		<8,5	8,1	<8,5		Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	‰	85.91	85	92,3	87	85,2	90		Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	‰	0.01	0.01		0.01		0.01		
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	‰ (jumlah per 100.000 penduduk)	53.62	52.62	97,7	51.62	37,1	50.62		
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	‰	0.01	PM	0,13	PM	0,01	PM		
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	20.39	PM	9,1	PM	14,4	PM		
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	0.43	PM		PM		PM		
	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	unit kerja	1	20	20	20	20	20	20	
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan an vaksin dasar yang aman,									

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	‰	769.20	PM		PM		PM		
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	72.23	PM		PM		PM		
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	1936	PM		PM		PM		
4.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (Tujuan 6)									
	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,									

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	45.22	PM		PM		PM		
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/kel	284	PM	284	PM	284	PM	284	

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Perangkat Daerah) memberikan kontibusi terhadap tujuan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-6.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

-

2.3.5 Isu-isu Penting dan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan

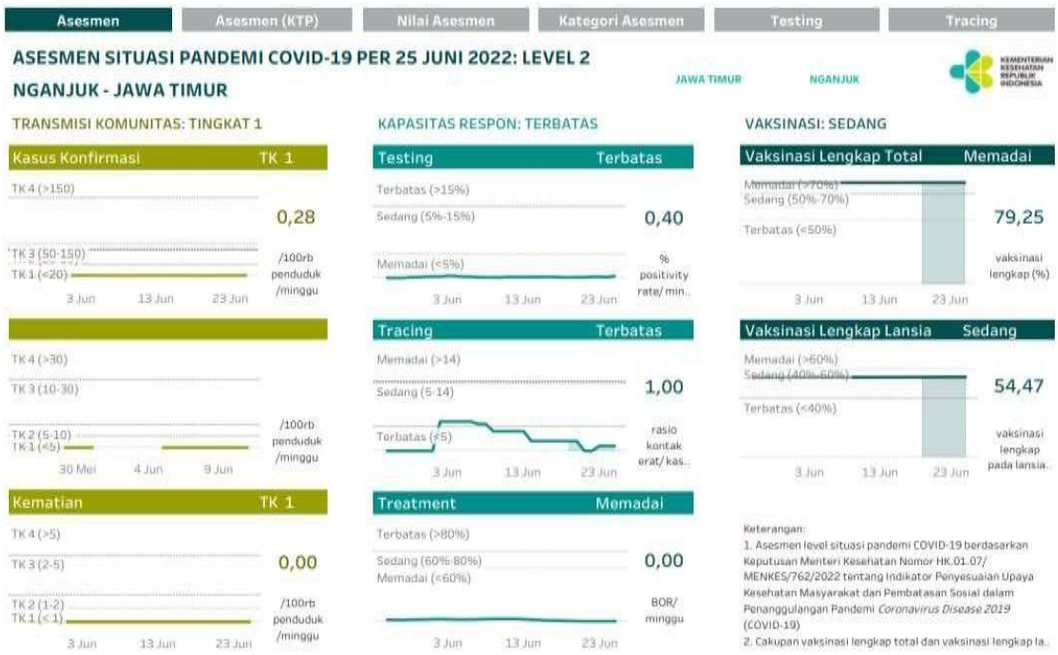
Dinas Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi
2. Masih adanya kasus balita gizi buruk dan balita stunting
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih kurang secara kuantitas dan kualitasnya (kompetensi).
4. Kurangnya kualitas dan mutu pelayanan Kesehatan, karena kurangnya sumberdaya dan fasilitas (sarana prasarana) yang memadai.
5. Pembiayaan kesehatan dari APBD Kabupaten masih kurang sehingga banyak kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak teranggarkan sehingga mempengaruhi capaian kinerja kesehatan.

2.3.6 Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, padatahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 2.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses review tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6 (T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINKES :										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**90,987,039,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**90,987,039,000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**25,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**25,000,000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**85,298,539,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**85,298,539,000**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes dan Puskesmas	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1200 orang/bulan	85,298,539,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes dan Puskesmas	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1200 orang/bulan	85,298,539,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**610,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**610,000,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes dan Puskesmas	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1200 paket	600,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes dan Puskesmas	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1200 paket	600,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Terlaksananya sosialisai peraturan perundang-undangan	20 orang	10,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Terlaksananya sosialisai peraturan perundang-undangan	20 orang	10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**579,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**579,500,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 paket	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 paket	15,000,000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 paket	195,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 paket	195,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 paket	100,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 paket	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	50 dokumen	4,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	50 dokumen	4,500,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50 laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50 laporan	250,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**971,884,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**971,884,000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Tersedianya kendaraan jabatan	2 unit	721.884.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Tersedianya kendaraan jabatan	2 unit	721.884.000	
	Pengadaan Mebel	Dinkes	Tersedianya Mebel	63 unit	39.000.000	Pengadaan Mebel	Dinkes	Tersedianya Mebel	63 unit	39.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 unit	211,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 unit	211,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**641,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**641,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	12 laporan	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	12 laporan	4,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 laporan	589,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 laporan	589,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 laporan	48,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 laporan	48,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2,861,116,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,861,116,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinkes	Jumlah kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinas jabatan	20 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinkes	Jumlah kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinas jabatan	20 unit	25,000,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	50 Unit	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinkes	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	50 Unit	300,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinkes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	2.306.116.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinkes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	2.306.116.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	215,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	215,000,000	

2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**37,725,204,193**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**37,725,204,193**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**13,900,000,000**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**13,900,000,000**	
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	11.150.000.000	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		11.150.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pustu cangkringan nganjuk, pustu ploso nganjuk, pustu munung jatikalen, polindes kartoharjo Nganjuk	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 unit	800,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pustu cangkringan nganjuk, pustu ploso nganjuk, pustu munung jatikalen, polindes kartoharjo Nganjuk	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 unit	800,000,000	

	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Prosentase Obat Fornas dan Perbekalan Kesehatan	30 paket	1,100,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Prosentase Obat Fornas dan Perbekalan Kesehatan	30 paket	1,100,000,000	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pagar Puskesmas Pembantu kendalrejo bagor, Pagar Puskesmas Pembantu Putren Sukomoro, Pagar Puskesmas Pembantu Banaran Wetan Bagor, Pagar puskesmas Pembantu Senjayan Gondang, Pagar puskesmas induk wilangan	Terlaksananya pembangunan pagar, urug dan paving puskesmas baron, pustu grojogan dan pustu ngujung	5 unit	800,000,000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pagar Puskesmas Pembantu kendalrejo bagor, Pagar Puskesmas Pembantu Putren Sukomoro, Pagar Puskesmas Pembantu Banaran Wetan Bagor, Pagar puskesmas Pembantu Senjayan Gondan	Terlaksananya pembangunan pagar, urug dan paving puskesmas baron, pustu grojogan dan pustu ngujung	5 unit	800,000,000	

							g, Pagar puskesmas induk wilangan				
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan di Puskesmas Induk, Puskesmas pembantu dan polindes	84 unit	50,000,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan di Puskesmas Induk, Puskesmas pembantu dan polindes	84 unit	50,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**22,968,204,193**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**22,968,204,193**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13333 orang	529,450,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13333 orang	529,450,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13296 orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13296 orang	75,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12882 orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12882 orang	50,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	480 orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	480 orang	75,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61491 orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61491 orang	75,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	661392 orang	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	661392 orang	25,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88806 orang	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88806 orang	100,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	381081 orang	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	381081 orang	25,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		25,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3293 orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3293 orang	75,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	10617 orang	90,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	10617 orang	90,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	17477 orang	502,216,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	17477 orang	502,216,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KLB ditangani < 24 jam	35 dokumen	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KLB ditangani < 24 jam	35 dokumen	20,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5 dokumen	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5 dokumen	25,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	20 dokumen	655,030,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	20 dokumen	655,030,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	4 dokumen	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	4 dokumen	25,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	4 dokumen	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	4 dokumen	75,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 dokumen	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 dokumen	75,000,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Surveilans Kesehatan	25 dokumen	50,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Surveilans Kesehatan	25 dokumen	50,000,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 orang	50,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	21 dokumen	350,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	21 dokumen	350,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1 dokumen	18.801.508.193	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1 dokumen	18.801.508.193	
	Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	300 orang	20,000,000	Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	300 orang	20,000,000	

	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	35 paket	25,000,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	35 paket	25,000,000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa STBM	7 dokumen	175,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa STBM	7 dokumen	175,000,000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Labkesda dan IFK	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 dokumen	390,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Labkesda dan IFK	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 dokumen	390,000,000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40 laporan	85,000,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	40 laporan	85,000,000	

								Pemberian Obat Massal)			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	500,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	500,000,000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				**250,000,000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**				**250,000,000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengeloaan data dan informasi kesehatan	5 dokumen	125,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengeloaan data dan informasi kesehatan	5 dokumen	125,000,000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	25,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	25,000,000	

	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 unit	100,000,000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 unit	100,000,000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**607,000,000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**607,000,000**	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kedaruratan masalah kesehatan di pos kesehatan pada hari besar nasional, idul fitri, natal tahun baru dan hari besar lainnya dan tercapainya pelayanan	20 unit	178.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kedaruratan masalah kesehatan di pos kesehatan pada hari besar nasional, idul fitri, natal tahun baru dan hari besar lainnya dan tercapainya pelayanan	20 unit	178.000.000	

	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan kesehatan emergency dan kebencanaan yang dilaksanakan	4 dokumen	429.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan kesehatan emergency dan kebencanaan yang dilaksanakan	4 dokumen	429.000.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**4,835,200,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**4,835,200,000**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				**20,000,000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**				**20,000,000**	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengajuan izin praktik tenakes yang diterima	1000 dokumen	10,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengajuan izin praktik tenakes yang diterima	1000 dokumen	10,000,000	

	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	4 dokumen	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksanany a Supervisi	4 dokumen	10,000,000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				**4,765,200,000**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**				**4,765,200,000**	

	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes dan Puskesmas	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	4 dokumen	60,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes dan Puskesmas	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	4 dokumen	60,000,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart	Dinkes dan Puskesmas	Jumlah Tenakes di fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	400 orang	4,705,200,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart	Dinkes dan Puskesmas	Jumlah Tenakes di fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	400 orang	4,705,200,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**50,000,000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**50,000,000**	

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes dan Puskesmas	jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai STR dalam periode waktu tertentu	1000 orang	50,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes dan Puskesmas	jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai STR dalam periode waktu tertentu	1000 orang	50,000,000	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**255,000,000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**255,000,000**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				**30,000,000**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**30,000,000**	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sasaran Bindalwas serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	30 dokumen	15.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sasaran Bindalwas serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	30 dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran perizinan apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 sarana	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran perizinan apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 sarana	15.000.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				**10,000,000**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**				**10,000,000**	

	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya jumlah pengendalian dan pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT	10 dokumen	10,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya jumlah pengendalian dan pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT	10 dokumen	10,000,000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				**80,000,000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				**80,000,000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran bindalwas serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT yang dapat diproduksi oleh IRT	50 dokumen	80,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran bindalwas serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT yang dapat diproduksi oleh IRT	50 dokumen	80,000,000	

	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				**120,000,000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				**120,000,000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diawasi	5 dokumen	120,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diawasi	5 dokumen	120,000,000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				**15,000,000**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**15,000,000**	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	50 unit	15,000,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sasaran produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	50 unit	15,000,000	

5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**1,050,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**1,050,000,000**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**150,000,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**150,000,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah kegiatan advokasi dan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kabupaten nganjuk	3 dokumen	150,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah kegiatan advokasi dan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kabupaten nganjuk	3 dokumen	150,000,000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**250,000,000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**250,000,000**	

	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten nganjuk	3 dokumen	250,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten nganjuk	3 dokumen	250,000,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**650,000,000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**650,000,000**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM di kabupaten nganjuk	4 dokumen	650,000,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jumlah bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM di kabupaten nganjuk	4 dokumen	650,000,000	
	PUSKESMAS										

1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**58,987,423,607**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**58,987,423,607**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**58,987,423,607**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**58,987,423,607**	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	20 pkm	Terlaksananya kegiatan rutin Puskesmas dari dana DAU	3 dokumen	13,246,010,732	Operasional Pelayanan Puskesmas	20 pkm	Terlaksananya kegiatan rutin Puskesmas dari dana DAU	3 dokumen	13,246,010,732	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 pkm	Terlaksananya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi BPJS	3 dokumen	45,741,412,875	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 pkm	Terlaksananya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi BPJS	3 dokumen	45,741,412,875	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesiyang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7(TC 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/nominal	Catatan
1	2	3	4	6	12
	DINKES :				
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			7.000.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewengangan Daerah Kabupaten/Kota			7.000.000.000	
	Pembangunan Puskesmas	Kec. Ngluyu	Jumlah Pusat Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	7.000.000.000	

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta pengendalian penduduk", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Terjaminnya aksesbilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta pengendalian penduduk	Indeks Kesehatan	80%
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Terjaminnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan dengan Didukung Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutupelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2 Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar

dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

3.3.3 Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

Tabel 3.3
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*) Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1)			
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			
	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	PM	Dinas Kesehatan
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tujuan 2)			
	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.			
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	<1	Dinas Kesehatan
	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	14	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	PM	Dinas Kesehatan
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (Tujuan 3)			
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.			
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000	‰	<82	Dinas

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
	kelahiran hidup.	(jumlah per 100.000 penduduk)		Kesehatan
	Jumlah ibu hamil dan bayi risiko tinggi yang didampingi	orang	PM	Dinas Kesehatan
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.			
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	‰	PM	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	‰	PM	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	‰	<8	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Imunization (UCI)*	‰	PM	Dinas Kesehatan
	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	‰	0,01	Dinas Kesehatan
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	‰ (jumlah per 100.000 penduduk)	48,62	Dinas Kesehatan
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	‰	PM	Dinas Kesehatan
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.			
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	PM	Dinas Kesehatan
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	PM	Dinas Kesehatan
	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	unit kerja	20	Dinas Kesehatan
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan an vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	‰	PM	Dinas Kesehatan
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	PM	Dinas Kesehatan
	Mendukung penelitian dan			

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
	pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.			
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	PM	Dinas Kesehatan
	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (Tujuan 6)			
	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	PM	Dinas Kesehatan
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/kel	PM	Dinas Kesehatan

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

3.3.4 Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemic Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan

protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
	Dinas Kesehatan	
1	Akses pelayanan kesehatan terjangkau	59,513,615,110
2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	37,725,204,193
3	Ambulan gratis untuk masyarakat kurang mampu	0

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)
1	Dinas Kesehatan			
	Terjaminnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)		501.128.767.086

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (output)	Target	
1	2	4	5	6
	DINKES :			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	2 laporan	25,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1200 orang /bulan	85,298,539,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	1200 orang	600,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisai peraturan perundang-undangan	20 orang	10,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 paket	15,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 paket	15,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 paket	195,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 paket	100,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	50 dokumen	4,500,000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	20 laporan	250,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan jabatan	2 unit	600,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraaan operasional/lapangan	50 unit	300.000.000
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel di Dinkes	63 unit	39.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 unit	211,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	12 laporan	4,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 laporan	589,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 laporan	48,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinas jabatan	20 unit	25,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	50 unit	300,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 unit	15,000,000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	2,306,116,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	1 unit	215,000,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	-	-
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 unit	800,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-
	Pengadaan Obat, Vaksin	Prosentase Obat Fornas dan Perbekalan Kesehatan	30 paket	1,100,000,000

	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembangunan pagar, urug dan paving puskesmas baron, pustu grojogan dan pustu ngujung	5 unit	800,000,000
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan di Puskesmas Induk, Puskesmas pembantu dan polindes	84 unit	50,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13333 orang	529,450,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13296 orang	75,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12882 orang	50,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	480 orang	75,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61491 orang	75,000,000

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	661392 orang	25,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88806 orang	100,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	381081 orang	25,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		25,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3293 orang	75,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	10617 orang	90,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	17477 orang	502,216,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB ditangani < 24 jam	35 dokumen	20,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang mendapatkan	5 dokumen	25,000,000

		pelayanan kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	20 dokumen	655,030,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	4 dokumen	25,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	4 dokumen	75,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 dokumen	75,000,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Surveilans Kesehatan	25 dokumen	50,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 orang	50,000,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	21 dokumen	350,000,000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1 dokumen	18,801,508,193

	Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi Dini Penyalahguna Napza Di Fasyankes dan Sekolah	300 orang	20,000,000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	35 paket	25,000,000
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa STBM	7 dokumen	175,000,000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 dokumen	390,000,000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40 laporan	85,000,000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	500,000,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengeloaan data dan informasi kesehatan	5 dokumen	125,000,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	25,000,000
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 unit	100,000,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya kedaruratan masalah kesehatan di pos kesehatan pada hari besar nasional, idul fitri, natal tahun baru dan hari besar lainnya dan tercapainya pelayanan	20 unit	178,000,000
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah layanan kesehatan emergency dan kebencanaan yang dilaksanakan	4 dokumen	429,000,000
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pengajuan izin praktik tenakes yang diterima	1000 dokumen	10,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes Fungsional serta Terlaksananya Supervisi	4 dokumen	10,000,000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan Pembinaan Tenaga Fungsional PKM RS, Pemilihan Nakes Teladan PKM, Pelatihan Nakes	4 dokumen	60,000,000

		Fungsional serta Terlaksananya Supervisi		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart	Jumlah Tenakes di fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	400 orang	4,705,200,000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai STR dalam periode waktu tertentu	1000 orang	50,000,000
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sasaran Bindalwas serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	30 dokumen	15,000,000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sasaran perizinan apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat	30 sarana	15,000,000

		Tradisional (UMOT)		
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya jumlah pengendalian dan pengawasan produk alat kesehatan dan PKRT	10 dokumen	10,000,000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sasaran bindalwas serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT yang dapat diproduksi oleh IRT	50 dokumen	50,000,000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diawasi	5 dokumen	120,000,000

	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	jumlah pangan siap saji yang mendapat pembinaan	-	-
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sasaran produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	50 unit	15,000,000
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya jumlah kegiatan advokasi dan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kabupaten nganjuk	3 dokumen	150,000,000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	terlaksananya jumlah upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten nganjuk	3 dokumen	250,000,000

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	terlaksananya jumlah bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM di kabupaten nganjuk	4 dokumen	650,000,000
	PUSKESMAS			
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**58,789,423,607**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**58,789,423,607**
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan rutin Puskesmas dari dana DAU	100%	13,246,010,732
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Operasional Puskesmas dan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi BPJS	100%	45,741,412,875

Tabel 4.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1.	Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	529.450.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	75.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	75.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	25.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	25.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	25.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	75.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	90.000.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	502.216.000	Dinas Kesehatan

Tabel 4.5
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			502,216,000		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk
Sekretaris



Dr. LAKSOMONO PRATIGNJO,SE.,M,Kes
Pembina
NIP. 19651015 200701 1 018